

## ABSTRAK

Pembangunan pada dasarnya adalah sebagai rangkaian usaha guna mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Saat ini pembangunan di Papua belum menyentuh dan mensejahterakan masyarakat Papua. Seperti halnya dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Papua, penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan di Wilayah Pembangunan III Grime (wilayah adat Dumutru) Kabupaten Jayapura telah mengalami kendala pada sistem kepemilikan tanah adat. Proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah adat Dumutru tidak berjalan sesuai target. Banyak faktor sebab akibat yang tak kunjung diselesaikan dalam waktu singkat. Tidak semua yang dibayangkan ketika perencanaan dimulai. Pemerintah membayangkan programnya pasti mulus berjalan sesuai target. Fakta tidak seperti apa yang dibayangkan, bahkan tidak disadari pula kemungkinan terburuk dari sebuah perencanaan itu suatu ketika akan berhadapan langsung dengan struktur dan sistem budaya dalam masyarakat. Situasi yang menghendaki Pemerintah seharusnya lebih paham nilai-nilai budaya dan sistem hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Dumutru, untuk menjadi bahan bagi perencanaan program maupun penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengapa hukum adat menghambat pembangunan dan bagaimana pola penerapan hukum adat yang sebaiknya dilakukan dalam penyelenggaraan pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura - Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap proses pengadaan tanah secara hukum formal, analisis terhadap proses pengadaan tanah secara hukum adat, analisis terhadap sebaran yuridis wilayah adat dan Sistem Hukum yang terdapat pada masyarakat adat Dumutru di Wilayah Pembangunan III Grime serta analisis terhadap proses keterlibatan masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan. Dari hasil analisis akan di tetapkan suatu alternatif pola penerapan hukum adat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura – Papua dikarenakan oleh beberapa hal: (a) Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura tidak berpedoman pada regulasi hukum positif yang mengatur tentang mekanisme pengadaan tanah, (b) Pelaksanaan pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat tidak berdasarkan pada aturan hukum adat, (c) Pemerintah belum memahami batas-batas wilayah adat, (d) Masyarakat hukum adat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan. Dari hasil analisis diketahui bahwa penyebab permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi Wilayah Pembangunan III Grime (wilayah adat Dumutru) adalah belum bersinerginya hukum positif dan hukum adat. oleh sebab itu sebagai out put dari penelitian ini akan ditetapkan suatu alternatif pola penerapan hukum adat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura - Papua.

**Kata kunci :** Pembangunan, Hukum Positif, Hukum adat